

ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 6 No. 2 Tahun 2024

Partisipasi Aktif Indonesia di RFMO:
Langkah Taktis dalam Akselerasi
Modernisasi Pengelolaan Perikanan

Penulis

 **Indra Jaya**

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB University

Partisipasi Aktif Indonesia di RFMO: Langkah Taktis dalam Akselerasi Modernisasi Pengelolaan Perikanan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Tantangan dan upaya yang sudah dilakukan Indonesia dalam pengelolaan perikanan
- 2) Peran dan kontribusi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO)
- 3) Pelajaran dari RFMO untuk memodernisasi pengelolaan perikanan

Ringkasan

Pengelolaan perikanan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan-tantangan yang ada untuk memastikan keberlanjutan perikanan. Misalnya, maraknya penangkapan ikan IUU, lemahnya penegakan peraturan perikanan, kemampuan pemantauan dan pengawasan yang tidak memadai, dan kepatuhan terhadap undang-undang perikanan, masih menjadi masalah besar, sehingga menghambat upaya pengelolaan perikanan. Dalam Policy Brief ini disampaikan 3 (tiga) rekomendasi dalam rangka modernisasi pengelolaan perikanan Indonesia melalui partisipasi aktif Indonesia dalam RFMO, yakni: (1) Perlunya komitmen politik pada tingkat tertinggi pemerintahan untuk memastikan partisipasi aktif dalam RFMO; (2) Negara perlu berinvestasi dalam membangun kapasitas kelembagaan agar dapat terlibat secara efektif dalam kegiatan RFMO; dan (3) Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang memadai untuk mendukung partisipasi aktif dalam kegiatan RFMO. RFMO telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan perikanan selama bertahun-tahun, sehingga Indonesia dapat belajar dari praktik pengelolaan perikanan yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh RFMO. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari RFMO, Indonesia dapat mengakselerasi modernisasi pengelolaan perikanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan dan menjamin keberlanjutan perikanan.

Kata kunci: Perikanan berkelanjutan, RFMO, penegakan peraturan, modernisasi perikanan

Pendahuluan

Perikanan merupakan sumber penghidupan dan ketahanan pangan yang penting bagi jutaan orang di seluruh dunia, terutama di masyarakat pesisir. Ikan merupakan sumber protein dan nutrisi penting yang penting di negara-negara berkembang di mana ikan merupakan sumber utama protein (FAO 2022). Selain itu, penangkapan ikan sering kali memiliki makna budaya dan sosial bagi Indonesia, sehingga membentuk identitas, tradisi, dan cara hidup.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan perikanan, namun terdapat pula upaya untuk memperbaiki situasi tersebut. Lemahnya penegakan peraturan perikanan, kemampuan pemantauan dan pengawasan yang tidak memadai, telah menghambat efektivitas pengelolaan perikanan dan kepatuhan terhadap undang-undang perikanan. Keterbatasan data mengenai stok ikan, kegiatan penangkapan ikan, dan dampak penangkapan ikan menjadikan pengembangan dan penerapan langkah-langkah pengelolaan berbasis bukti menjadi tantangan. Penangkapan ikan IUU masih menjadi masalah besar di perairan Indonesia, sehingga menghambat upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan, termasuk penetapan kawasan perlindungan laut, penerapan kuota penangkapan ikan dan sistem perizinan, serta upaya untuk memerangi IUU fishing (Jaya *et al.* 2022). Tanpa pengelolaan yang efektif, penangkapan ikan yang berlebihan dapat menurunkan dan mengancam populasi ikan hingga ke tingkat yang tidak berkelanjutan, sehingga menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem laut dan air tawar. Dengan menerapkan langkah-langkah seperti kuota penangkapan ikan dan batasan tangkapan, pengelolaan perikanan membantu menjaga stok ikan tetap sehat. Dengan mengelola perikanan secara berkelanjutan, dapat

dipastikan bahwa sumber daya ikan tetap tersedia dan dapat diakses, sehingga membantu mengurangi kelaparan, malnutrisi, dan kerawanan pangan.

Indonesia telah menjalin kemitraan dengan negara lain, organisasi regional, dan inisiatif internasional untuk mengatasi masalah perikanan lintas batas, memerangi IUU fishing, dan mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, seperti pengaturan pengelolaan bersama dan proses pengambilan keputusan partisipatif, telah diterapkan di beberapa daerah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan keberlanjutan perikanan skala kecil. Indonesia telah menjajaki penggunaan teknologi dan inovasi, seperti pemantauan satelit, VMS, sistem pemantauan elektronik, dan teknologi rantai pasok, untuk meningkatkan pengawasan, ketertelusuran, dan transparansi perikanan.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam penerapan langkah-langkah pengelolaan perikanan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan perikanan dalam jangka panjang. Hal ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, dan investasi dalam inisiatif peningkatan kapasitas untuk memodernisasi dan memperkuat pengelolaan perikanan demi lestariannya sumber daya laut untuk generasi mendatang.

Sejarah Singkat dan Peran RFMO

Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO) adalah badan internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan atau kawasan tertentu untuk mengelola dan melestarikan sumber daya perikanan yang dimiliki bersama di antara anggota (Asmundsson 2016). RFMO dibuat melalui

perjanjian atau traktat dan beroperasi dengan tujuan mempromosikan pengelolaan perikanan berkelanjutan, mencegah penangkapan ikan berlebihan, dan memastikan konservasi sumber daya laut dalam jangka panjang. Organisasi-organisasi ini biasanya berfokus pada pengelolaan stok ikan yang bermigrasi jauh, seperti tuna, ikan todak, dan marlin, yang melintasi berbagai yurisdiksi nasional dan menjadi sasaran eksploitasi oleh armada kapal dari berbagai negara.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara mulai menyadari pentingnya mengelola sumber daya perikanan di luar yurisdiksi nasional, khususnya spesies yang bermigrasi jauh seperti tuna, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya kerja sama internasional untuk mengelola dan melestarikan sumber daya perikanan bersama.

Pembentukan zona ekonomi eksklusif (ZEE) berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 memperluas yurisdiksi nasional atas sumber daya perikanan dalam radius 200 mil laut dari negara pantai, sehingga meningkatkan minat dalam kerja sama regional. Pada tahun 1980-an dan 1990-an terjadi perkembangan RFMO yang berfokus pada wilayah dan spesies berbeda, termasuk tuna, ikan todak, marlin, dan spesies yang bermigrasi jauh lainnya. RFMO terkemuka yang dibentuk selama periode ini termasuk Komisi Internasional untuk Konservasi Tuna Atlantik (ICCAT) pada tahun 1966, Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC) pada tahun 1993, dan Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC) pada tahun 2004.

Pada abad ke-21, RFMO menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengatasi penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan konservasi spesies yang rentan. RFMO telah memperkuat langkah-langkah pengelolaannya, meningkatkan upaya pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS), dan meningkatkan mekanisme kepatuhan untuk mendorong pengelolaan dan konservasi perikanan berkelanjutan. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Stok Ikan PBB (UNFSA) yang diadopsi

pada tahun 1995 dan Kode Etik FAO untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab telah memberikan kerangka kerja bagi RFMO untuk mendorong kerja sama dan mengadopsi praktik terbaik.

Meskipun ada kemajuan, tantangan masih tetap ada, termasuk penangkapan ikan IUU, masalah kapasitas, dan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan RFMO.

Peran dan tanggung jawab RFMOs berpusat pada pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan bersama yang efektif di wilayah masing-masing. RFMO bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan untuk memastikan penggunaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penetapan batas tangkapan, pengaturan alat dan metode penangkapan ikan, penetapan wilayah atau musim tertutup, dan penerapan langkah-langkah untuk melindungi spesies dan habitat yang rentan.

RFMO mengoordinasikan upaya untuk memantau aktivitas penangkapan ikan, menegakkan peraturan, dan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) di wilayah masing-masing. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kapal (VMS), program pengamat, inspeksi pelabuhan, dan tindakan lain untuk memastikan kepatuhan terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan.

RFMO menetapkan prosedur dan mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan, mengatasi ketidakpatuhan, dan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan. Kerja sama antar negara anggota sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif, dan RFMO sering kali bekerja sama dengan otoritas nasional dan organisasi internasional untuk memerangi IUU fishing.

Kontribusi RFMO dalam Pengelolaan Perikanan

RFMOs telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan perikanan selama bertahun-tahun. Negara-negara yang melakukan penangkapan ikan dapat belajar dari praktik pengelolaan perikanan yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh RFMOs.

Negara-negara perikanan dapat mempelajari langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh RFMO, seperti batasan tangkapan, peraturan alat tangkap, dan penutupan kawasan, dan menyesuaikannya dengan kerangka pengelolaan perikanan nasional mereka sendiri. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari RFMO, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan perikanan dan mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

RFMO mengandalkan penelitian ilmiah dan berbagi data untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan mereka. Negara-negara dapat belajar dari RFMO dengan berinvestasi dalam penelitian ilmiah, penilaian stok, dan program pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika perikanan dan interaksi ekosistem. Dengan meningkatkan kapasitas ilmiah dan upaya pengumpulan data, negara-negara dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengembangkan strategi pengelolaan berbasis bukti.

RFMO mengoordinasikan upaya pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS) untuk memerangi penangkapan ikan IUU di wilayahnya masing-masing. Negara-negara dapat belajar dari RFMO dengan meningkatkan kemampuan pemantauan dan penegakan hukum mereka sendiri, termasuk penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kapal (VMS), program pengamat, dan inspeksi pelabuhan. Dengan meningkatkan mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum, negara-negara dapat mencegah penangkapan ikan IUU dan memastikan bahwa

kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara legal dan berkelanjutan.

RFMO melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk negara-negara anggota, perwakilan industri perikanan, organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal, untuk mendorong transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perikanan. Negara-negara dapat belajar dari RFMO dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dialog dan kerja sama antar berbagai kepentingan, dan mendorong distribusi manfaat sumber daya perikanan yang adil.

RFMO memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi regional di antara negara-negara anggota untuk mengatasi tantangan pengelolaan perikanan bersama. Negara-negara dapat belajar dari RFMO dengan berpartisipasi dalam forum regional dan internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, serta berkolaborasi dalam penelitian bersama dan inisiatif pengelolaan. Dengan bekerja sama di tingkat regional dan internasional, negara-negara dapat mencapai hasil pengelolaan perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan belajar dari pengalaman dan praktik RFMO, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan mereka, mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati laut baik pada skala regional maupun global. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar negara dan RFMO sangat penting terutama untuk mengatasi tantangan pengelolaan perikanan yang kompleks dan bersifat lintas batas.

Rekomendasi

Partisipasi aktif dalam RFMO memerlukan strategi keterlibatan jangka panjang yang memprioritaskan komitmen berkelanjutan, kerja sama, dan kolaborasi antar negara anggota. Pemerintah perlu mengembangkan rencana dan

tujuan strategis, dengan jadwal, pencapaian, dan indikator kinerja yang jelas dalam mengevaluasi kemajuan dan mengukur keberhasilan. Untuk itu ada 3 (tiga) rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. Perlunya komitmen politik pada tingkat tertinggi pemerintahan untuk memastikan partisipasi aktif dalam RFMO. Pemerintah perlu memprioritaskan pengelolaan perikanan sebagai prioritas nasional dan regional, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan menunjuk perwakilan yang memenuhi syarat untuk terlibat secara efektif dalam pertemuan RFMO dan proses pengambilan keputusan.
2. Negara perlu berinvestasi dalam membangun kapasitas kelembagaan agar dapat terlibat secara efektif dalam kegiatan RFMO. Hal ini mencakup pembentukan lembaga/unit yang berdedikasi, meningkatkan keahlian teknis dalam ilmu pengetahuan dan pengelolaan perikanan, dan mengembangkan kerangka hukum dan peraturan untuk menerapkan langkah-langkah RFMO di tingkat nasional.
3. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang memadai untuk mendukung partisipasi aktif dalam kegiatan RFMO. Hal ini dapat mencakup pendanaan biaya perjalanan untuk menghadiri pertemuan, partisipasi dalam kelompok kerja dan komite ilmiah, dan penerapan langkah-langkah RFMO di tingkat nasional.

Daftar Pustaka

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2022. State of World and Fisheries and Aquaculture.

Jaya I, Satria F, Nugroho, L. Sadiyah, E A Buchary, A T White, E C Franklin, C A Courtney, G Green, S J Green. 2022. Are the working principles of fisheries management at work in Indonesia? *Marine Policy* 140, 105047

Asmundsson S. 2016. Regional Fisheries Management Organization (RFMOs): Who are they, what is their geographic coverage on the high seas and which ones should be considered as General RFMOs, Tuna RFMOs and Specialized RFMOs? <https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-fao-19-en.pdf>

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Indra Jaya, adalah Guru Besar pada Dept. Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Selama 10 tahun terakhir aktif menjadi bagian dari Delegasi RI dalam pertemuan-pertemuan organisasi tuna regional (IOTC dan CCSBT).

(Corresponding Author)

Email : indrajaya@apps.ipb.ac.id



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680